Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterampilan Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017)

Obrian Trisna Pratama¹, Arnes Anandita²

¹*Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Sukoharjo, 57162*

Email: obeeriaen.obrian@gmail.com

²*Program Studi Perhotelan, Akademi Pariwisata Mandala Bhakti Surakarta, Jl. Ki Mangun Sarkoro 20, Surakarta, 57135*

Email: arnesanandita@mandalabhakti.ac.id

Abstract— *This research aims to analyse and prove about the effect of human resource capacity, accounting internal control, use of information technology, and regional financial supervision on the reliability of local government financial reporting. This research object is the Regional Finance Agency of Sukoharjo Regency. The sampling method use purposive sampling. Number of respondent in this research were 50 employee. Data analysis method use multiple linier regression analysis. The research result show that human resource capacity, accounting internal control, use of information technology, and regional financial supervision effect on the reliability of local government financial reporting.*

Keywords—: Human Resource Capacity; Accounting Internal Control; Use of Information Technology; Regional Financial Supervision.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diberlakukannya otonomi daerah, mengakibatkan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut tentu disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang terkait dalam kerangka desentralisasi fiskal. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Primayana, Atmadja, & Darmawan, 2014).

Proses akuntansi atau tata keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Institusi-institusi pemerintahan saat ini, harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi (Andriani (2010) dalam Mahaputra & Putra (2014)).

Laporan keuangan pemerintah daerah bisa saja dijadikan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, informasi dalam laporan keuangan sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan dari semua kalangan ataupun dalam hal ini kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan juga pemerintah. Dengan ini berarti, laporan keuangan pemerintah daerah tentunya tidak dirancang untuk hanya memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Walaupun demikian, laporan keuangan pemerintah daerah dalam perannya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka komponen laporan yang diinformasikan paling tidak

mencakup jenis laporan atau elemen informasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Terdapat karakteristik laporan keuangan yang merupakan syarat yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang sesuai dengan ditentukan (PP No 71 Tahun 2010) yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Primayana, Atmadja, & Darmawan, 2014).

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai dasar pengelolaan teknis keuangan daerah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 memberikan masa transisi untuk perubahan dari cash basis ke accrual basis dalam waktu 5 tahun (sampai tahun 2008). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, yaitu menggunakan basis modifikasi kas menuju akrual. Basis ini mengharuskan penyajian akun aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual, sedangkan akun pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Menurut Mardiasmo, dalam Pasal 33 UU No 33/2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD. Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi mendukung kebijakan Depkeu tersebut. Setidaknya terdapat tiga alasan yang dapat dijadikan dasar sanksi tersebut: (1) UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (2) faktor koordinasi nasional, yaitu kondisi pelaporan perda APBD yang sering terlambat sehingga mengganggu perekonomian nasional (3) faktor kepentingan daerah.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Primayana, Atmadja, & Darmawan (2014) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan studi empiris pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan secara empiris apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Membuktikan secara empiris apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Membuktikan secara empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
4. Membuktikan secara empiris apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

II. LANDASAN TEORI

A. Metode Penelitian Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer dengan membagikan kuesioner pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang berstruktur, dimana jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden sudah disediakan. Objek penelitian ini adalah Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo..

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian

karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah para staf/pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Metode pengumpulan data yaitu dengan penyebaran kuesioner. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pegawai bagian akuntansi/keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan Pelaporan Keuangan adalah kemampuan untuk memberikan suatu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keterandalan diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Desmiyawati (2014) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

2. Variabel Independen

E. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari diri manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kapasitas sumber daya manusia diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Desmiyawati (2014) berdasarkan penelitian GTZ dan USAID/CLEANUrban (2001). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kapasitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut: (1) Sumber daya manusia yang berkualifikasi. (2) Peran dan fungsi ditetapkan secara jelas. (3) Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas. (4) Sumber daya pendukung operasional

F. Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian intern akuntansi merupakan kegiatan yang dirancang untuk melindungi aktiva seta untuk meneliti keterandalan informasi akuntansi. Pengendalian intern akuntansi diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Desmiyawati (2014) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut; (1) penyelenggaraan sistem akuntansi dan prosedur sesuai peraturan, (2) dokumen dan catatan yang memadai, (3) pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang ditetapkan, (4) transaksi yang dicatat benar-benar terjadi, (5) pencatatan semua transaksi yang terjadi.

G. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemanfaatan teknologi informasi diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Desmiyawati (2014) berdasarkan penelitian Jurnal & Supomo (2002).

H. Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Yosa (2010), pengawasan merupakan usaha yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan, untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, dan untuk memperbaiki serta menjamin sumber daya pemerintahan digunakan secara efektif dan efisien mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi dalam hal ini pemerintah daerah. Pengawasan keuangan yang dilakukan juga diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keterandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Pengawasan keuangan daerah diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Desmiyawati (2014) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengawasan keuangan daerah adalah sebagai berikut: (1) Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. (3) Pencatatan transaksi diklasifikasikan dengan benar. (4) Terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas.

III.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah persamaan regresi berganda. Analisis regresi berganda dipilih untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 α : Konstanta
 X_1 : Kapasitas Sumber Daya Manusia
 X_2 : Pengendalian Intern Akuntansi
 X_3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi
 X_4 : Pengawasan Keuangan Daerah
e : Error Term

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) sebesar 0,649, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah) menjelaskan variasi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sukoharjo sebesar 64,9% dan 35,1% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model.

2. Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test)

Untuk variabel Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah didapatkan hasil bahwa nilai F hitung (23,688) dengan *p-value* = 0,000 sedangkan F tabel (2,579) dengan ketentuan $\alpha = 5\%$, $df = k-1$ atau $4-1 = 3$, dan $df_2 = n-k$ atau $50-4 = 46$, hasil uji dari distribusi F hitung (23,688) lebih besar dari F tabel (2,579) dengan *p-value* 0,000 < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dan dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa model *goodness of fit*.

A. Estimasi Parameter dan Interpretasi (Uji Hipotesis)

Estimasi parameter dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi tiap-tiap variabel yang diuji menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikasinya. Hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 2,384 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah diasumsikan konstan maka Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.
2. Koefisien regresi pada variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,326 menunjukkan bahwa jika Kapasitas Sumber Daya Manusia itu semakin taat maka Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.
3. Koefisien regresi pada variabel Pengendalian Intern Akuntansi sebesar 0,356 menunjukkan bahwa jika Pengendalian Intern Akuntansi itu semakin baik maka Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.
4. Koefisien regresi pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,184 menunjukkan bahwa jika Pemanfaatan Teknologi Informasi itu semakin kompleks maka Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.
5. Koefisien regresi pada variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 0,291 menunjukkan bahwa jika Pengawasan Keuangan Daerah itu semakin baik maka Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat.

B. Pembahasan

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 3,563 lebih besar dari t tabel sebesar 2,014, dan nilai sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari 5%, sehingga H_1 diterima artinya Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah secara statistik signifikan. Berdasarkan hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, Adiputra, & Atmadja (2015), Primayana, Atmadja, & Darmawan (2014) dan Mahaputra & Putra (2014) menyatakan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pengendalian Intern Akuntansi Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Pengendalian Intern Akuntansi sebesar 4,945 lebih besar dari t tabel sebesar 2,014, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H_2 diterima, artinya Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah secara statistik signifikan. Berdasarkan hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh

Pratiwi, Adiputra, & Atmadja (2015), Primayana, Atmadja, & Darmawan (2014) menyebutkan bahwa Pengendalian Intern Akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Berdasarkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 3,450 lebih besardari t tabel sebesar 2,014, dan nilai sig. sebesar 0,001 lebih besar dari 5%, sehingga H₃ diterima artinya Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah secara statistik signifikan. Berdasarkan hasil ini menunjukkan adanya tidak ada kesamaan penelitian yang dilakukan Pratiwi, Adiputra, & Atmadja (2015) dan Primayana, Atmadja, & Darmawan (2014) menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan peneliti Fitriani & Daljono (2012) yang menyatakan bahwa kompleksitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. *Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Berdasarkan hipotesis kelima menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 4,102 lebih besar dari t tabel sebesar 2,014, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H₄ diterima artinya Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah secara statistik signifikan. Berdasarkan hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, Adiputra, & Atmadja (2015), Anggaraeni, Purnamasari, & Atmadja (2012), Primayana, Atmadja, & Darmawan (2014), Kuasa & Abdullah (2016) menunjukkan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

V. KESIMPULAN

A. *Kesimpulan*

Setelah mengetahui permasalahan, meneliti, dan membahas hasil penelitian tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka peneliti mengambil simpulan terkait apa yang sudah dilakukan. Adapun simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih kecil dibanding *level of significant* yaitu sebesar ($0,001 < 0,005$), sehingga hipotesis H₁ dalam penelitian ini diterima.
2. Variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih kecil dibanding *level of significant* yaitu sebesar ($0,000 < 0,005$), sehingga hipotesis H₂ dalam penelitian ini diterima.
3. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih kecil dibanding *level of significant* yaitu sebesar ($0,001 < 0,005$), sehingga hipotesis H₃ dalam penelitian ini diterima.
4. Variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih kecil dibanding *level of significant* yaitu sebesar ($0,000 < 0,005$), sehingga hipotesis H₄ dalam penelitian ini diterima.

B. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran yang bermanfaat sebagai berikut:

1. Peneliti diharapkan mengawasi pengisian kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen dan menambah sampel penelitian.
3. Lingkup penelitian terbatas pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga menambah lagi pada instansi lain

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggaraeni, M., Purnamasari, I. G., & Atmadja, A. W. (2012). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Komitmen Manajemen Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study kasus pada pemerintah SKPD). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) UNDIKSHA*, 3. doi:<http://dx.doi.org/1023887/jimat.v3i1.52441>
- Desmiyawati. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Empiris Pada SKPD Pemda Riau. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 163-178.
- Fitriani, S., & Daljono. (2012). Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengetahuan dan Persepsi Etis Terhadap Audit Judgement. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 1-12.

- Jurnali, T., & Supomo, B. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *IJAR (The Indonesian Journal Accounting Research)*, 5(2). doi:<http://doi.org/10.33312/ijar.79>
- Kuasa, N., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Administrasi Akuntansi Pascasarjana UNSYIAH*, 5(2).
- Mahaputra, I. P., & Putra, I. W. (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(2), 230-244.
- Pratiwi, P. R., Adiputra, I. M., & Atmadja, A. T. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1) UNDIKSHA*, 3(1). doi:<http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4750>
- Primayana, K. H., Atmadja, A. W., & Darmawan, N. A. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1) UNDIKSHA*, 2(1). doi:<http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v2i1.2492>
- Yosa. (2010). *Pengertian Pengawasan, Birokrasi*. Retrieved January 1, 2020, from itjendepdagri: <http://itjendepdagri.go.id/article-24-birokrasi.html>.